



**KEPUTUSAN PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN
MENARIK TURKI KELUAR DARI KONVENSI ISTANBUL
2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

SKRIPSI

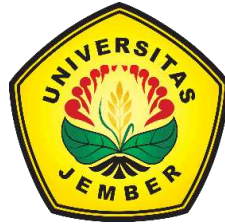
Oleh:

Deva Aulia Putri Syam

180910101064

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2023



**KEPUTUSAN PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN
MENARIK TURKI KELUAR DARI KONVENSI ISTANBUL
2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Deva Aulia Putri Syam

NIM 180910101064

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2023

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua serta adik-adik saya yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh *civitas* akademi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.



MOTTO

"... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah: 286)..."

(Al-Baqarah: 286)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deva Aulia Putri Syam

NIM : 180910101064

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,

Deva Aulia Putri Syam

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan Menarik Turki Keluar dari Konvensi Istanbul 2021 Tentang Perlindungan Perempuan” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 12 Juli 2023

Waktu : 15.00 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Drs. Sus Eko Zuhri Ernada, Grad.Dipl.IR., (.....)
M.A., CIQaR, CIQnR
NIP : 196810281994031002

2. Pembimbing Utama

Nama : Fuat Albayumi, S. IP, M.A (.....)
NIP : 197404242005011002

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Abubakar Eby Hara, MA. Ph.D (.....)
NIP : 96402081989021001

2. Penguji Anggota 1

Nama : Suyani Indriastuti, S.Sos. MA. Ph.D (.....)
NIP : 197701052008012013

RINGKASAN

Keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan Menarik Turki Keluar dari Konvensi Istanbul 2021 Tentang Perlindungan Perempuan; Deva Aulia Putri Syam; 180910101064; 2023; 41 halaman; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Skripsi ini mengkaji tentang keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk keluar dari Konvensi Dewan Eropa tentang Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikenal dengan Konvensi Istanbul. Pemerintah Turki pertama kali menandatangani konvensi pada 11 Mei 2011 di Istanbul. Namun, 10 tahun setelah bergabung dengan konvensi tersebut, Turki membalikkan kebijakan dan memutuskan untuk menarik diri pada tahun 2021 di bawah pemerintahan Erdogan. Bahkan, kekerasan terhadap perempuan di Turki telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penarikan Turki dari Konvensi Istanbul menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai alasan Erdogan mengambil keputusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dengan menggunakan data sekunder. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara menginterpretasikan objek penelitian yang kemudian dinarasikan agar dapat dilihat hubungan sebab-akibat. Dalam mencari jawaban atas kebijakan Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul tentang perlindungan perempuan, penulis menggunakan Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Oleh Valerie M. Hudson yang menitikberatkan pada aspek domestik untuk menemukan jawaban di balik keputusan Presiden Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul dipengaruhi oleh faktor domestik, dimana desakan politik dalam proses pembuatan kebijakan sangat mempengaruhi keputusan politik Erdogan. Penulis melihat bagaimana Erdogan sebagai sosok pemimpin dengan karakter keislaman kuat bersama Partai yang dibawanya yaitu AKP telah membentuk pemerintahan

islamis di Turki. Pasal dalam Konvensi tersebut dianggap mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak LGBTQ+ yang bertentangan dengan nilai budaya domestik Turki. Penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas mewarnai Erdogan dalam pengambilan keputusannya untuk keluar dari Konvensi Istanbul tentang perlindungan perempuan.



PRAKATA

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keputusan Erdogan Menarik Turki Keluar Dari Konvensi Istanbul 2021 Tentang Perlindungan Perempuan” hingga tuntas dengan segala rintangan yang dihadapi. Skripsi ini merupakan persyaratan akademi untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Progran Studi Hubungan Internasional Universitas Jember.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan banyak-banyak ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M. Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Sus Eko Zuhri Ernada, Grad.Dipl.IR., MA.,CIQaR, CIQn Rdan Bapak Fuad Albayumi selaku Dosen pembimbing selama penulis menyusun skripsi, sehingga penulis dapat membuka cakrawala pengetahuan lebih luas dan mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Bapak Abubakar Eby Hara, MA. Ph.D dan Ibu Suyani Indriastuti, S.Sos. MA. Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta saran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang saya banggakan, untuk semua dedikasi dan inspirasi dalam menimba ilmu di perkuliahan yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Mama Indah dan Papa Dimi atas dukungan kepada saya baik moril maupun materil dan kasih sayangnya untuk segera menyelesaikan skripsi, serta adik-adik tercinta (Ira, Nazwa, dan Ara) yang selalu menyemangati penulis dengan segala bantuan, bimbingan, dorongan serta doa yang diberikan penulis selama penyusunan skripsi.

6. Teman-teman selama masa perkuliahan: Ann, Alifah, Sevi, Sukma, Putri yang menjadi *support system* dari semester awal hingga bisa lulus bersama-sama. Dan juga kepada teman-teman Kos penulis yaitu Lidya, Hani, Adex yang menemani penulis yang selalu siap sedia menuruti keinginan penulis untuk lebih semangat lagi di kala sedang tidak *mood* mengerjakan skripsi.
7. Serta semua rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih

Jember, 12 Juli 2023

Penulis,

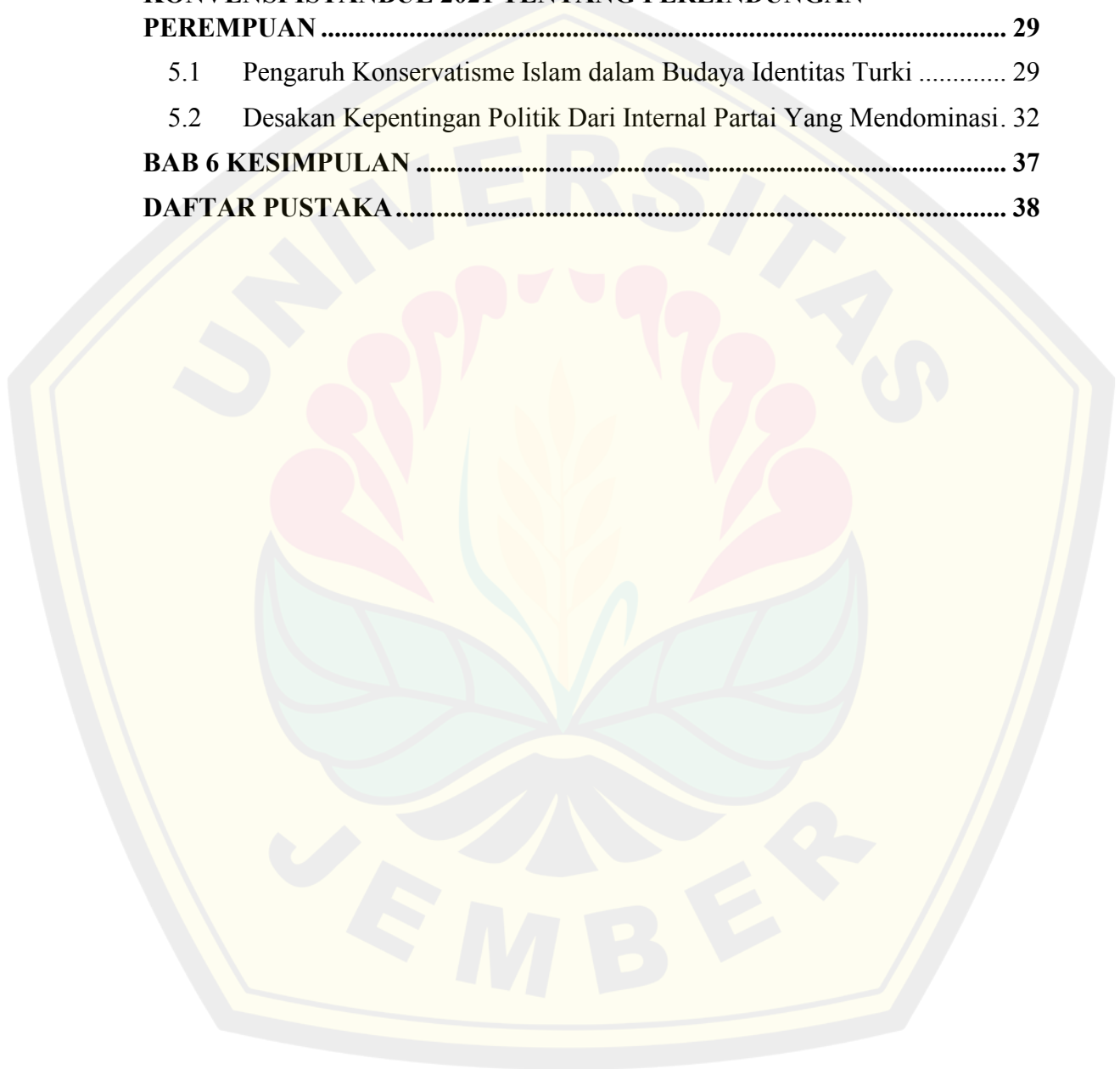
Deva Aulia Putri Syam

NIM. 180910101064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Oleh Valerie M. Hudson.....	6
2.2 Tinjauan Studi Terdahulu	8
2.3 Ringkasan Penerapan Teori.....	10
BAB 3 METODE PENELITIAN	12
3.1 Pendekatan Penelitian.....	12
3.2 Obyek dan Fokus Penelitian.....	13
3.3 Pengumpulan Data	13
3.4 Keabsahan Data	14
3.5 Analisis data	15
3.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB 4 GAMBARAN UMUM KONVENSI ISTANBUL 2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	18
4.1 Ruang Lingkup Konvensi Istanbul.....	18

4.2	Proses Ratifikasi Konvensi Istanbul Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan	21
4.3	Kebangkitan Gerakan Anti Gender di Turki	24
4.4	Kebijakan Presiden Erdogan yang Menarik Turki Keluar Dari Konvensi Istanbul	27
BAB 5 ALASAN PENARIKAN DIRI PRESIDEN ERDOGAN DARI KONVENSI ISTANBUL 2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN		29
5.1	Pengaruh Konservatisme Islam dalam Budaya Identitas Turki	29
5.2	Desakan Kepentingan Politik Dari Internal Partai Yang Mendominasi. 32	
BAB 6 KESIMPULAN		37
DAFTAR PUSTAKA.....		38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Femisida di Turki..... 2
Gambar 4. 1 Peta Keanggotaan Konvensi Istanbul.....20



DAFTAR SINGKATAN



AKP	: Partai Keadilan dan Pembangunan (<i>Adaltve Kalkinme Partisi</i>)
COE	: <i>Council of Europe</i>
EU	: <i>The European Union</i>
FRA	: <i>European Agency for Fundamental Rights</i>
G20	: <i>The Group of Twenty</i>
GONGO	: <i>Government-Organized Non-Governmental Organization</i>
GREVIO	: <i>Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence</i>
IC	: <i>Istanbul Convention</i>
KADEM	: <i>Kadyn ve Demokrasi Derneyi</i>
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LGBTQ+	: <i>Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer and Ace</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
SP	: <i>The Felicity Party (Turkish: Saadet Partisi)</i>
TÜBİTAK	: <i>The Scientific and Technological Research Council of Turkey</i>
TÜRGEV	: <i>Türkiye Gençlik ve Eitime Hizmet Vakfı</i>
UU	: Undang-undang
WHO	: <i>The World Health Organization</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

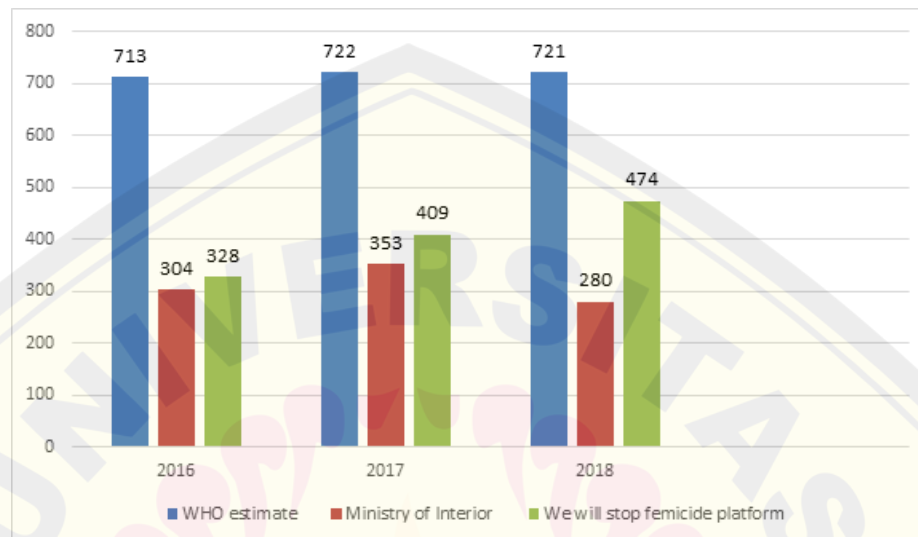
1.1 Latar Belakang

Konvensi Istanbul adalah sebuah instrumen pertama yang mengikat secara hukum untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, dan difokuskan pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban perempuan dan menuntut para pelaku (Simonovic, 2014). Konvensi ini diadopsi oleh Komite Menteri Dewan Eropa pada 7 April 2011. Konvensi Istanbul menandai tonggak penting dalam mencapai cita-cita Eropa bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Kewajiban untuk melindungi hak asasi perempuan menjadi tanggung jawab negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Istanbul untuk memberikan penekanan khusus pada hak-hak asasi manusia (Istanbul Convention, 2014).

Konvensi Istanbul dibuka untuk ditandatangani pertama kalinya pada tanggal 11 Mei 2011 di Istanbul. Terdapat 47 anggota Dewan Eropa yang telah menandatangani Konvensi Istanbul (Council of Europe, 2011). Turki menjadi negara pertama yang menandatangani konvensi ini sejak tahun 2011 dengan persetujuan Majelis Nasional Agung sebagai badan perwakilan rakyat tertinggi di Turki. Selanjutnya pada 14 Maret 2012, Parlemen Turki menyetujui untuk meratifikasi dengan suara bulat oleh Majelis Nasional Agung (Fatih Beyaz, 2021). Recep Tayyip Erdogan yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, bersama dengan partai yang dibawanya yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adaltve Kalkinme Partisi- AKP*) mendukung penandatanganan Konvensi Istanbul.

Salah satu permasalahan yang terjadi di Turki yaitu tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dinilai menjadi isu yang cukup serius. Pasalnya statistik femisida di Turki pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kasus pembunuhan perempuan di Turki mengalami tren yang meningkat. Salah satu kelompok feminisme besar di Turki yang menentang femisida adalah *We Will Stop Femicide Platform* ikut menerbitkan data Femisida di

Turki pada tahun 2016 hingga 2018. Statistik femisida juga dibagikan ke publik dari waktu ke waktu oleh para Menteri melalui siaran pers, diterbitkan dalam situs web resmi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keluarga pada tahun 2020 yang ditunjukkan dalam grafik berikut:



Gambar 1. 1 Data Femisida di Turki

Sumber : <https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/icisleri-bakani-soylu-kadina-yonelik-artan-siddeti-kabullendi-1702396>

Dapat diartikan bahwa tren kasus ini memiliki perbedaan jumlah baik yang diterbitkan oleh WHO, Menteri Dalam Negeri, maupun platform We Will Stop Femicide. Semua data kasus yang dicatat oleh pemerintah belum mencerminkan angka sebenarnya dari kasus femisida. Statistik hanya menampilkan kasus yang dilaporkan kepada pihak berwajib (Jones, 2022). Pemerintah dan pengadilan Turki terkesan menutupi tentang masalah femisida, dan sejauh ini belum ada kemauan politik yang nyata untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, meskipun sudah ada 474 kasus pada tahun 2018. Angka tersebut diterbitkan oleh kelompok *We Will Stop Femicide*. Selanjutnya menurut data Femisida di Turki yang diterbitkan oleh WHO, informasi yang ditampilkan dalam grafik menyentuh angka paling tinggi yaitu: pada tahun 2016 terdapat 713 kasus, pada tahun 2017 dengan 722 kasus, dan pada tahun 2018 berjumlah 721 kasus (Cumhuriyet, 2019).

Tergabungnya Turki dalam Konvensi Istanbul memperkuat komitmen pemerintah Erdogan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Konvensi Istanbul secara resmi dimasukkan ke dalam undang-undang domestik Turki No. 6284 pada 1 Agustus 2014 (Council of Europe, 2021). Konvensi Istanbul mensyaratkan adanya jaminan keamanan bagi perempuan tidak hanya dari kekerasan dalam keluarga tetapi juga mencakup ruang publik. UU No. 6284 tentang Kekerasan Berbasis Gender yang dimasukkan kedalam undang-undang domestik tersebut telah menarik cukup banyak kritik dari kelompok agama serta kelompok konservatif. Pada poin pasal nomor 4 dalam Konvensi Istanbul tertulis sebagai berikut:

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status. (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2011)

Kemudian Erdogan mengeluarkan dekrit presiden No. 3718 dan Keputusan Presiden No. 9 pada 20 Maret 2021, yang menyatakan pengakhiran keikutsertaan Turki dalam Konvensi Istanbul (Sayin Ayşe, 2021). Atas pernyataannya tersebut, terjadi aksi demonstrasi luas dan dikecam keras oleh kelompok hak-hak perempuan di Turki serta negara-negara barat. Penarikan dari Konvensi Istanbul terjadi di tengah maraknya kasus KDRT dan femisida yang terjadi di Turki, tentu keputusan Erdogan sangat disayangkan dan memunculkan pertanyaan di balik alasannya menarik diri dari Konvensi ini. Menurut data yang diperoleh dari platform *We Will Stop Femicide*, sebuah komunitas pejuang hak perempuan di Turki, yang mempublikasikan data dari laporan surat kabar dan pengaduan yang mereka terima, sekitar 300 wanita dibunuh pada tahun 2020 oleh suami atau kerabat mereka, dan sejak awal tahun 2021 terdapat 189 kasus pembunuhan wanita yang tercatat (We Will Stop Femicide, 2021).

Fenomena di atas menjadi penting untuk diteliti karena Turki sebagai negara yang pertama kali menandatangani perjanjian ini, pada akhirnya lebih memilih untuk keluar dari Konvensi Istanbul pada 1 Juli 2021. Penulis akan menganalisis alasan dibalik keputusan Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul tentang Perlindungan Perempuan. Fenomena ini menjadi relevan dengan studi dalam hubungan internasional dikarenakan sikap Erdogan sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional yang menjadi pembuat keputusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan Menarik Turki Keluar dari Konvensi Istanbul 2021 tentang Perlindungan Perempuan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Suatu karya ilmiah membutuhkan pijakan fundamental untuk dapat menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa agar tetap fokus dan tidak meluas ke pembahasan lainnya. Oleh karena itu, perlu bagi penulis untuk merumuskan masalah yang dapat mengawal fokus dari suatu penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah yaitu **“Mengapa Presiden Recep Tayyip Erdogan memutuskan menarik Turki Keluar dari Konvensi Istanbul 2021 tentang perlindungan perempuan?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Creswell, tujuan dari penelitian kualitatif ialah sebagai *purpose statement* yang didefinisikan sebagai “.... a statement that advance the overall direction of focus for the study” , bahwa tujuan penelitian merupakan kontrol ide dan pusat dalam suatu penelitian (Creswell, 2003). Dengan adanya *purpose statement*, penulisan akan mengarah kepada ide-ide peneliti dalam mencapai tujuan akhir dari penelitian yang dilakukannya. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui alasan Erdogan

menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul 2021 tentang perlindungan perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menambah wawasan dalam melihat bagaimana sebuah aktor negara berperan dalam memutuskan kenijakan suatu negara:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau informasi dalam studi Hubungan Internasional. Hasil akhir skripsi ini diharapkan dapat memperkaya sekaligus memperdalam pembahasan tentang analisis kebijakan Erdogan sebagai aktor negara dalam hubungan internasional yang memutuskan untuk tidak lagi tergabung dengan Konvensi Istanbul. Penulis mengharapkan karya ini dapat menjadi sumber pembandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penggiat isudalam studi Hubungan Internasional, diantaranya:

- a. Memberikan informasi bagaimana sebuah kebijakan suatu negara dibentuk dari proses bertahap.
- b. Memberikan tambahan literatur sebagai bahan pustaka studi Hubungan Internasional tentang penarikan diri sebuah negara dari sebuah perjanjian internasional.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Teori berfungsi untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku atau aktor, memberikan perspektif dalam menjawab suatu fenomena, dan membimbing serta menyajikan gaya penelitian. Dengan menggunakan gaya penelitian kualitatif, teori dapat diformulasikan secara deskriptif. Teori terbagi atas teori substansif dan teori formal. Teori substansif disusun demi keperluan empiris, sedangkan teori formal digunakan untuk keperluan pengembangan secara konseptual yang berbeda dalam taraf abstraksinya (Moleong, 2014).

Dari tinjauan pustaka dapat dilihat bahwa, dalam sebuah penulisan karya ilmiah selain diperlukan adanya studi terdahulu juga diperlukan sebuah kerangka teori dasar. Teori merupakan konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika, menjadi suatu bentuk pernyataan, sehingga bisa menjelaskan fenomena secara ilmiah (M. Mas'ood, 1990). Teori dapat membantu dalam memahami dan memberikan hipotesis dengan bentuk sistematis. Teori memiliki peran yang penting dalam suatu penulisan ilmiah, sehingga dapat dikatakan bahwa teori dapat menjelaskan maksud dari fenomena yang terjadi. Agar dapat mempermudah dalam menganalisis fenomena yang telah dijelaskan di latar belakang, maka penulis menggunakan Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Oleh Valerie M. Hudson yang menitikberatkan pada aspek domestik untuk menemukan jawaban di balik keputusan Presiden Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul.

2.1.1 Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Oleh Valerie M. Hudson

Kebijakan luar negeri negara menjadi penting untuk dianalisa agar mengetahui sejauh mana dan atas landasan apa suatu kebijakan itu dibuat. Dalam hubungan internasional suatu kebijakan membutuhkan premis dasar bagaimana suatu aktor-aktor negara mengambil keputusan, baik bertindak secara individu atau dalam kelompok. Dalam buku yang berjudul *Foreign Policy Analysis* yang ditulis oleh Valerie M. Hudson, Hudson mengemukakan

bahwa terdapat lima tingkatan analisa, yaitu individu berperan sebagai pengambil keputusan, kelompok perumus kebijakan, budaya dan identitas nasional, politik domestik, dan sistem internasional (Hudson, 2005, hal. 3).

Menurut Hudson, politik domestik merupakan tingkat analisa yang dapat digunakan dalam menganalisa kebijakan luar negeri yang ditinjau melalui variabel nasional. Kebijakan luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan politik domestik suatu negara. Peran kelompok masyarakat dalam pembuatan kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai hasil dari aktor-aktor politik domestik (Hudson, 2005a, hal. 11). Aktor tersebut biasanya adalah lembaga-lembaga elit dalam suatu negara misalnya partai politik, kelompok-kelompok masyarakat yang mendominasi. Dengan membawa kepentingan-kepentingan nasionalnya, maka bisa dijadikan landasan untuk mencapai kepentingan global.

Pada level nasional, kelompok domestik mengejar kepentingan mereka dengan cara menekan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang yang menguntungkan. Partai politik juga turut mencari kekuasaan dengan membangun koalisi di antara kelompok tersebut. Dengan demikian, keadaan politik domestik di dalam sebuah negara dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembuat keputusan untuk menciptakan sebuah kebijakan luar negeri.

Dalam sebuah politik domestik, elit politik menjadi fokus penting dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi negara. Elit politik ini pula yang lebih cenderung menonjolkan persepsi-persepsinya sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri negara. Pada akhirnya, persepsi ini membentuk identitas politik luar negeri suatu negara. Dengan demikian, keadaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembuat keputusan untuk menciptakan sebuah kebijakan luar negeri.

Berdasarkan aspek yang telah dijelaskan di atas, Kebijakan Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul akan dianalisis menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri dalam aspek politik domestik yaitu Erdogan

sebagai kepala negara Turki dalam menentukan arah kebijakan didorong oleh pengaruh kelompok-kelompok tertentu dalam suatu negara.

2.2 Tinjauan Studi Terdahulu

Pada bagian ini, penulis akan mencantumkan studi terdahulu sebagai referensi tambahan dalam menyusun skripsi ini. Pertama, penulis merujuk pada sebuah skripsi berjudul *Tuntutan Masyarakat Terhadap Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul* yang ditulis oleh Femri Resdifianti, Dini Septianti N & Ratih Kusuma Dewi pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji bagaimana publik Turki membentuk opini publik yang menuntut keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul. Tuntutan masyarakat Turki di ruang publik dilakukan sembari memengaruhi praktik politik pemerintah Turki yang sedang berkuasa. Ruang publik dimanfaatkan masyarakat Turki untuk mendiskusikan mengenai pro dan kontra Konvensi Istanbul menggunakan teori ruang publik Habermas. (Resdifianti, dk., 2022).

Berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, keputusan Erdogan keluar dari Konvensi Istanbul akan menggunakan konsep domestik oleh Valerie Hudson yang menekankan pada adanya dorongan dari kelompok-kelompok yang mendominasi dalam suatu negara sehingga mempengaruhi keputusan Erdogan sebagai aktor negara yang merumuskan kebijakan.

Sumber rujukan kedua berjudul *Turkey, Europe and Women's Rights: The Controversial Debate on the Istanbul Convention* yang ditulis oleh Carola Cerami pada tahun 2021. Artikel tersebut menjelaskan bahwa selama Konvensi Istanbul diberlakukan memiliki dampak positif bagi Eropa, didukung oleh sistem penegakan dan pemantauan Konvensi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran Konvensi Istanbul dipengaruhi oleh kampanye disinformasi yang memicu perdebatan antara kaum progresif dan konservatif. Perdebatan ini terjadi di Eropa Tengah dan Timur, di mana Konvensi Istanbul mendapat perlawanan keras dari berbagai kelompok. Artikel ini juga memperkenalkan pro dan kontra atas keputusan Turki untuk mundur dari Konvensi tersebut. Artikel jurnal tersebut mengeksplorasi dampak dan akibat dari Keputusan Presiden Erdogan keluar dari Konvensi

Istanbul yang menimbulkan ketidakpuasan besar sehingga memicu reaksi langsung dari dalam negeri yaitu masyarakat sipil maupun pada kancah internasional.

Berbeda dengan artikel tersebut, dalam skripsi yang penulis teliti akan lebih menganalisis alasan yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri oleh Erdogan yang memutuskan keluar dari Konvensi Istanbul. Bagaimana seorang aktor negara berusaha mempertahankan kekuasaannya dan memperkuat citranya sebagai pemimpin. Hal ini menjadikan isyarat simbolis bagi Erdogan dan Partai AKP dengan mencari dukungan dari kelompok yang mendominasi di Turki.

Sumber rujukan selanjutnya adalah skripsi dengan judul Kebangkitan Ide – Ide Sufisme dalam Kebijakan Luar Negeri Republik Turki Pada Masa Recep Tayyid Erdogan yang ditulis oleh David Setiawan pada tahun 2013. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pada masa Erdogan yang melakukan serangkaian kebijakan Strategic Depth (penggalan kembali) atau menghidupkan kembali nilai dan identitas Islam. Gerakan Islamis masyarakat terbukti menjadi elemen

penting dalam pertumbuhan masyarakat sipil di Turki. Bentuk gerakan Islamis menghasilkan hubungan kerjasama Turki dengan Uni Eropa dan dunia Arab. Terdapat persamaan model penelitian tersebut dengan skripsi penulis ialah menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri milik Hudson yang artinya analisis negara dengan melihat segala kebudayaan dan identitas yang dominan dalam perkembangan kebijakan. Namun dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai kebijakan Erdogan terkait pengunduran diri Erdogan dari Konvensi Istanbul dipengaruhi oleh faktor internal perpolitikan budaya.

Sumber rujukan selanjutnya adalah artikel jurnal yang berjudul *The Feminist Movement during the AKP era in Turkey: Challenges and Opportunities* yang ditulis oleh Melinda Negrón Gonzales yang terbit pada tahun 2016. Artikel ini menjelaskan penggunaan politik Islam oleh AKP dan Erdogan selama kepemimpinan mereka untuk memungkinkan Turki tetap jaya

dengan sistem Islamnya. Artikel tersebut juga menjelaskan tekad Erdogan untuk mengubah sistem sekuler saat ini yang menghilangkan unsur Islam dan menjadikannya sekuler sesuai prinsip Islam. Selain itu, artikel tersebut membahas bagaimana Partai Keadilan dan Pembangunan yang selama ini menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai keadilan yang lebih demokratis justru mengabaikan hak-hak perempuan karena partai tersebut menuntut perempuan yang lebih lembut dan tradisional. Artikel ini menyoroti bahwa sifat patriarki dari perspektif gender tradisional AKP akan berdampak negatif terhadap kesetaraan gender di Turki. Kesimpulan dari artikel ini adalah pandangan-pandangan yang diberikan oleh aktor-aktor yang berprinsip Islam dianggap tidak sejalan dengan semua kelompok, terutama yang mendukung gerakan perempuan Turki. Berbeda dari artikel tersebut, skripsi ini akan menganalisis faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kebijakan penarikan Turki dari Konvensi Istanbul di bawa pemerintahan Presiden Erdogan terkait fokus konservatif sosial AKP.

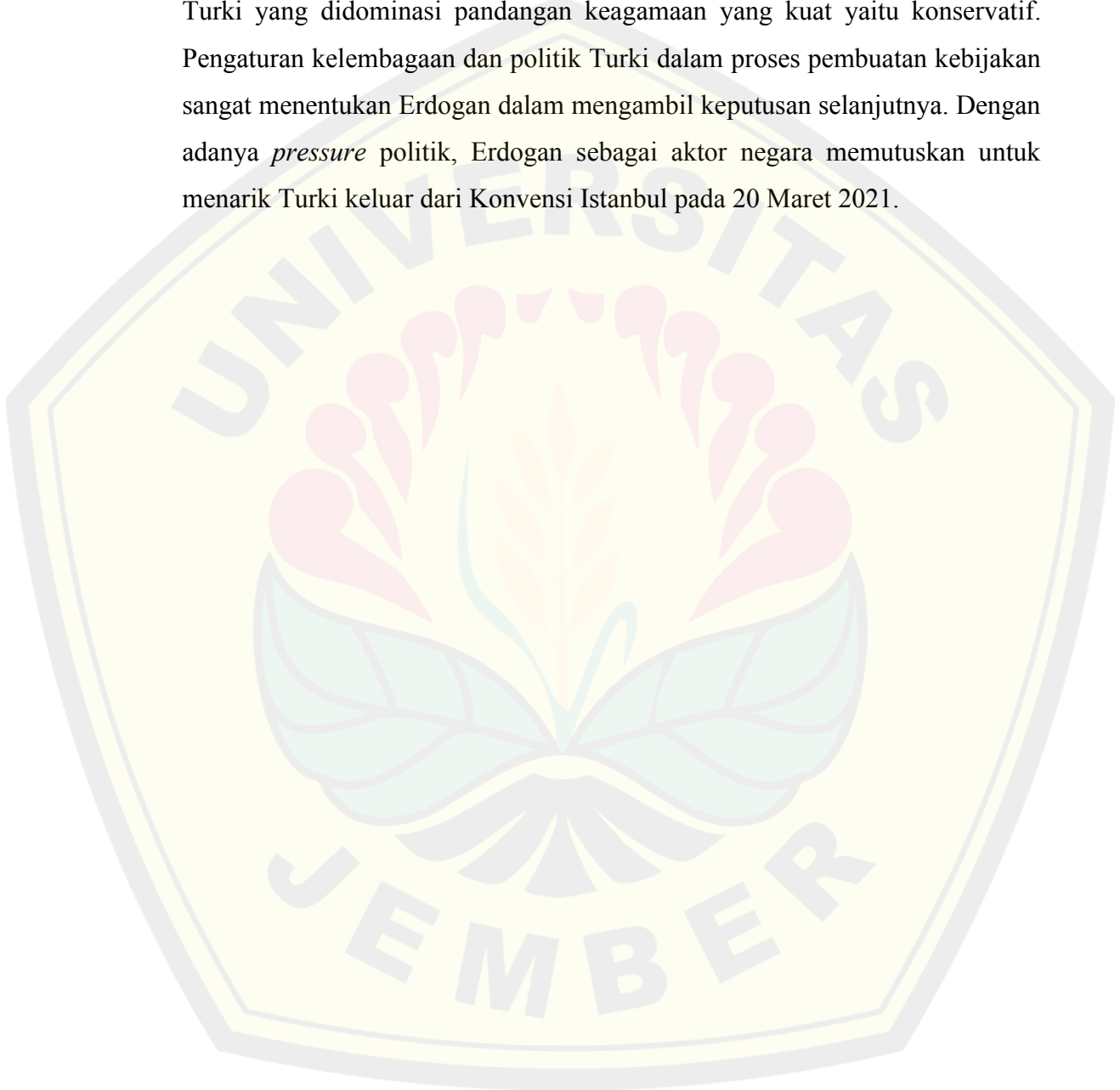
Dari tinjauan pustaka yang telah dijabarkan, masih belum terdapat kesamaan fokus penelitian dengan skripsi penulis. Fokus utama dalam skripsi ini ialah menganalisis faktor yang melatarbelakangi kebijakan Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul. Skripsi ini akan mengungkap alasan dibalik keputusan pengunduran diri tersebut menggunakan teori kebijakan luar negeri oleh Valerie M. Hudson. Penelitian – penelitian yang telah dijabarkan diatas akan menjadi bahan referensi dalam membantu penulisan skripsi ini.

2.3 Ringkasan Penerapan Teori

Ringkasan penerapan teori digunakan sebagai panduan singkat mengenai peta pemikiran, bagaimana penulis akan menganalisis permasalahan yang diangkat menggunakan teori dan konsep yang telah dipilih demi mencapai sebuah kesimpulan. Dalam mencari jawaban atas kebijakan Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul tentang perlindungan perempuan, penulis menggunakan Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Oleh Valerie M. Hudson yang menitikberatkan pada aspek domestik untuk menemukan jawaban di

balik keputusan Presiden Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul.

Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, penulis menarik argumen utama bahwa kebijakan Presiden Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul dipengaruhi dari segi domestik yaitu politik dan budaya internal di Turki yang didominasi pandangan keagamaan yang kuat yaitu konservatif. Pengaturan kelembagaan dan politik Turki dalam proses pembuatan kebijakan sangat menentukan Erdogan dalam mengambil keputusan selanjutnya. Dengan adanya *pressure* politik, Erdogan sebagai aktor negara memutuskan untuk menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul pada 20 Maret 2021.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam ilmu sosial berfokus pada penyelesaian masalah sosial yang berusaha untuk meningkatkan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena yang spesifik. Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku dan orang yang dapat diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau fakta lisan (Moelong, 2000). Penelitian kualitatif menyelidiki secara cermat terhadap suatu fenomena atau sekelompok individu-individu sebagai alat penelitian. Studi kasus yang mengarahkan pada sasaran penelitiannya dengan berlandaskan teori-teori dasar. Serta dibatasi oleh waktu dan aktifitas dalam mengumpulkan informasi menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.

Output dari metode penelitian kualitatif jenis ini adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Peneliti berusaha untuk menafsirkan melalui kata-kata secara terperinci dibalik alasan fenomena terjadi dengan mengedepankan deskripsi dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Pendekatan seperti ini diarahkan pada latar belakang secara holistik dan lengkap. Proses penelitian kualitatif melibatkan kerja yang signifikan, dimulai dengan merumuskan berbagai pertanyaan dan hipotesis, mengumpulkan data tertentu, dan menganalisis data oleh peneliti yang turut mewarnai hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian yang berjudul Keputusan Erdogan Menarik Turki Keluar Dari Konvensi Istanbul Perlindungan Perempuan, peneliti menitikberatkan pada upaya pemahaman juga deskripsi dari data-data yang dipilih dari berbagai sumber yang menggunakan pendekatan kualitatif.

3.2 Obyek dan Fokus Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini berfungsi untuk membatasi cakupan analisa agar lebih terfokus dan spesifik pada pembahasan alur yang diinginkan. Penulis membagi lingkup pembahasan menjadi dua bagian yaitu batasan materi dan batasan waktu. Objek yang dikaji dalam skripsi ini adalah keputusan Erdogan yang keluar dari Konvensi Istanbul 2021 tentang perlindungan perempuan. Dengan demikian, fokus penelitian mengarah pada analisis faktor-faktor dibalik keputusan Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul yang cukup mengejutkan dunia mengingat Turki merupakan negara pertama yang meratifikasi Konvensi Istanbul. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada faktor internal baik dari segi sosial, budaya, ataupun politik dalam negara Turki sendiri.

Untuk menghindari pembahasan yang lebih meluas, penulis juga membatasi periode kejadian yang dikaji yaitu mulai tahun 2014 hingga 2021. Tahun 2014 tepatnya di tanggal 1 Agustus merupakan waktu dimana ratifikasi Konvensi Istanbul mulai diberlakukan. Sedangkan tahun 2021 dipilih menjadi titik akhir penelitian karena pada tanggal 22 Maret 2021 merupakan peristiwa dimana Presiden Turki yaitu Raciep Tayyip Erdogan memutuskan untuk keluar dari Konvensi Istanbul melalui dekrit presiden. Namun, penulis tidak menutup kemungkinan untuk mengambil data di luar tahun yang telah ditentukan demi menunjang kebutuhan penelitian. Tentunya penulis akan melihat kebelakang untuk mempertajam analisis penelitian dibalik faktor atau alasan apa saja yang membuat Erdogan secara bulat dan resmi tidak lagi terikat dengan Konvensi Istanbul.

3.3 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu sarana yang dapat membantu penulis dalam mengembangkan penelitian. Penulis menggunakan studi kepustakaan atau metode studi literatur sebagai teknik pengumpulan data untuk menganalisis skripsi ini. Kegiatan pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang bersumber dari penelitian para pengamat, karya tulis ilmiah terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku yang

berhubungan dengan permasalahan yang dianalisis oleh peneliti, dan artikel internet yang terpercaya maupun sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas penulis.

Menurut Sugiyono, metode studi literatur akan bersifat aktual karena menggunakan jenis data teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2017). Setiap data yang diperoleh dari pengumpulan data kemudian dapat dikategorikan dalam tema pokok permasalahan yang dianalisis. Penulis berusaha mendapatkan lebih banyak informasi dari sumber bacaan, melihat masalah dari sudut yang berbeda, dan menarik kesimpulan yang diinginkan sebagai tujuan akhir. Dari pengumpulan data tersebut, penulis dapat menjelaskan faktor ataupun alasan dibalik keputusan Erdogan yang memutuskan untuk keluar dari Konvensi Istanbul pada 2021.

3.4 Keabsahan Data

Keabsahan data dapat diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahan data yang disajikan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel jika terdapat kesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian. Metode triangulasi diperlukan untuk menguji reliabilitas data dalam penelitian ini atau reliabilitas data penelitian kualitatif. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis dan interpretif penelitian kualitatif. Triangulasi juga diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu (Moleong, 2014).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara meneliti data yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti menganalisis data yang diperoleh, menarik kesimpulan, kemudian

meminta persetujuan dari tiga sumber data (member check) (Sugiyono, 2017).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data dengan cara meneliti data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data dapat diperiksa melalui wawancara, observasi, catatan. Jika teknik pengujian kredibilitas, data menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2017).

3.5 Analisis data

Menurut Ardhana, analisis data adalah proses menyusun urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar (Moleong, 2002). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, dimana analisis data akan bertumpu pada cara mendeskripsikan, cara menginterpretasikan, dan cara menginterpretasikan objek penelitian yang menjadi latar belakang pembahasan makalah. Kemudian, proses analisis akan mengolah data yang terkumpul sesuai dengan subjek penelitian dan tujuan penulisan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Dalam proses analisis ini, penulis memulai dari penggambaran Konvensi Istanbul secara besar. Untuk memudahkan penulis mengaitkan teknik pengumpulan data yang diinginkan maka penulis akan menentukan terlebih dahulu dan memfokuskan hasil penyederhanaan data. Dari data yang telah diperoleh, penulis akan melakukan ringkasan data yang berkaitan dengan Konvensi Istanbul serta Erdogan sebagai aktor utama negara yang berperan sebagai pengambil kebijakan pengunduran diri Turki dari Konvensi Istanbul. Setelah ditemukan data yang spesifik, penulis akan menjabarkan dalam bentuk

narasi terkait alasan ataupun faktor yang melandasi Erdogan untuk menarik Turki keluar dari konvensi Istanbul. Kemudian hasil dari analisis data penulis dapat lebih mudah untuk dipahami dan ditarik kesimpulan akhir.

3.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan memberikan gambaran terkait topik permasalahan yang akan dibahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian. Latar belakang yang disajikan memuat gambaran besar terhadap permasalahan yang diteliti dibalik Konvensi Istanbul serta komponen-komponennya. Gambaran permasalahan yang telah dipaparkan akan memunculkan suatu rumusan masalah sebagai fokus dari kajian yang akan dibahas oleh penulis. Dari rumusan masalah yang diangkat, penulis berharap dapat menemukan jawaban paling maksimal dibalik alasan Erdogan memutuskan untuk keluar dalam Konvensi Istanbul tentang perlindungan perempuan. Kemudian, dalam bab ini tercakup tujuan serta manfaat penelitian skripsi dan manfaat akademis bagi perkembangan ilmu hubungan internasional.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang teori atau konsep yang dijadikan acuan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. Dimulai dari pengertian menurut beberapa ahli dari teori yang diangkat, lalu penulis akan menjelaskan konsep yang digunakan untuk menganalisis kebijakan Erdogan keluar dari Konvensi Istanbul. Kemudian, penulis akan menjabarkan penerapan teori kaitannya dengan fenomena yang diteliti, memasukkan variabel ataupun indikator yang ada dalam Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Oleh Valerie M. Hudson kedalam representasi proses pembuatan kebijakan oleh Erdogan. Selanjutnya penulis dapat membuat sebuah argumen utama untuk dapat menjawab rumusan masalah atau hipotesa sebagai jawaban awal tentang faktor apa sajakah yang mendorong Erdogan untuk keluar dalam Konvensi Istanbul.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan metode penelitian dimulai dari pendekatan penelitian, obyek dan fokus penelitian. pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

Bab 4 Gambaran Umum Konvensi Istanbul 2021 Tentang Perlindungan Perempuan

Bab ini akan menganalisis dan menginterpretasi peristiwa untuk memahami gambaran Konvensi Istanbul serta faktor-faktor apa saja yang menjadi keputusan Erdogan untuk menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul. Sebelum penulis membahas alasan-alasan dibalik Erdogan keluar dari Konvensi Istanbul, penulis akan membahas terlebih dahulu apa itu konvensi Istanbul

Bab 5 Alasan Penarikan Presiden Erdogan dari Konvensi Istanbul 2021 Tentang Perlindungan Perempuan

Penulis akan menjabarkan alasan yang melatar belakangi kebijakan Erdogan untuk keluar dari Konvensi Istanbul dengan menggunakan Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Oleh Valerie M. Hudson. Dengan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, penulis dapat melihat bagaimana pengambilan sebuah kebijakan seorang aktor negara yaitu Erdogan dalam Konvensi Istanbul dipengaruhi oleh dinamika baik itu internal perpolitikan budaya.

Bab 6 Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian akhir atau penutup yang memuat kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian diatas.

BAB 4

GAMBARAN UMUM KONVENSI ISTANBUL 2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

4.1 Ruang Lingkup Konvensi Istanbul

Fenomena kekerasan berbasis gender merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menjadi perhatian negara-negara di dunia. Berdasarkan laporan dari *European Agency for Fundamental Rights*, sebuah lembaga Uni Eropa yang mengatur hak-hak asasi manusia, menunjukkan bahwa sebanyak 33% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual atau fisik sejak usia 15 tahun (FRA, 2014). Tingkat kekerasan terhadap perempuan di negara-negara Eropa masih belum mengalami progres yang signifikan dan menjadi akar permasalahan yang belum diatasi secara maksimal (Olga, 2015). Bahkan kekerasan tersebut juga mengakibatkan pada hilangnya nyawa atau disebut Femisida yang melambangkan pembunuhan terkait gender terhadap perempuan yang dikategorikan kasus kekerasan ekstrim.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan langkah konkrit yang harus diambil oleh Dewan Eropa sebagai salah satu institusi utama yang memiliki peranan untuk menentukan arah dan prioritas Uni Eropa. Kewajiban untuk melindungi hak asasi perempuan menjadi tanggung jawab negara-negara yang tergabung dalam Dewan Eropa untuk memberikan penekanan khusus pada hak-hak asasi manusia. Dewan Eropa wajib menyediakan kerangka hukum demi perlindungan perempuan berbasis gender dan kekerasan.

Konvensi Istanbul merupakan sebuah instrumen pertama yang dibentuk oleh Dewan Eropa yang menetapkan standar hukum komprehensif untuk memastikan hak perempuan terbebas dari kekerasan (Europe, 2011). Dalam Konvensi Istanbul, kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Konvensi ini dikenal sebagai

Konvensi Istanbul karena ia dibuka untuk ditandatangani pertama kalinya di Istanbul pada tahun 2011.

Sehubungan dengan kewajiban negara yang berasal dari ketentuan perjanjian, Konvensi Istanbul mewajibkan negara anggotanya untuk mengkriminalkan beberapa tindakan yang termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan, diantaranya adalah: Kekerasan psikologis, menguntit, kekerasan fisik, kekerasan seksual (termasuk pemerkosaan), pernikahan paksa, mutilasi alat kelamin perempuan, aborsi paksa, sterilisasi paksa pelecehan seksual (Council of Europe, 2011).

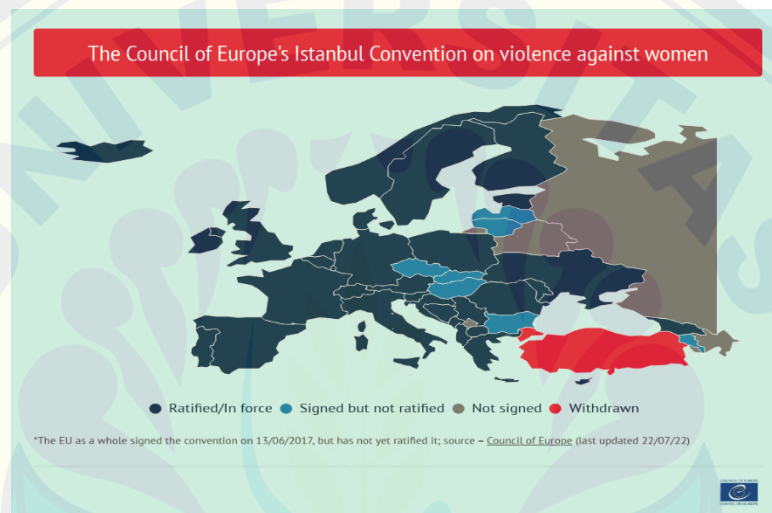
Konvensi Istanbul kemudian mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang ditetapkan dalam Konvensi dapat dihukum dengan sanksi yang efektif, proporsional, dan disuasif. Kewajibannya mencakup empat bidang tindakan, yakni pencegahan kekerasan terhadap perempuan (*prevention*), perlindungan korban (*protection*), penuntutan perilaku (*prosecution*), serta pelaksanaan kebijakan (*co-ordinated policies*) (IlkesI, n.d.).

Konvensi Istanbul menganjurkan pendekatan empat pilar untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan di berbagai lapisan masyarakat dan menyediakan alat yang diperlukan untuk membantu para korban. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti pelatihan profesional, kampanye peningkatan kesadaran, dan program pengobatan. Upaya dilakukan sebagai alat untuk perlindungan perempuan seperti memberi polisi kekuatan untuk mengeluarkan pelaku dari rumah keluarga mereka, memastikan akses ke informasi, tempat penampungan, saluran bantuan telepon, dan pusat rujukan. Hal ini juga mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan untuk memfasilitasi penuntutan pelaku. Terakhir, konvensi mendorong integrasi semua kebijakan melalui tindakan bersama dari lembaga pemerintah, LSM, dan otoritas nasional, regional, dan lokal.

Tujuan utama Konvensi Istanbul yang jelas adalah untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan, tetapi di tengah kampanye pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu, kerap kali tersebar informasi

melenceng mengenai istilah gender dan tuduhan palsu oleh pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu yang mengklaim bahwa Konvensi Istanbul mengancam gagasan keluarga tradisional Turki yang menyebabkan beberapa negara tidak ikut bergabung meratifikasi Konvensi Istanbul.

Diantara negara-negara yang telah menandatangani Konvensi tetapi belum meratifikasinya adalah Bulgaria, Republik Ceko, Hungaria, Latvia, Lithuania, Republik Slovakia. Kekhawatiran muncul dari beberapa negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut karena pendekatan dan isi dari Konvensi Istanbul yang dinilai mengusung konsep kesetaraan gender.



Gambar 4. 1 Peta Keanggotaan Konvensi Istanbul

Sumber: <https://www.coe.int/documents/11071445/11641547/the-council-of-europes-istanbul-convention-on-violence-against-women+%284%29.png/083ebb51-05e6-1b13-0f08-89aa549252dc?t=1662994007000>

Beberapa negara anggota konvensi yang belum meratifikasi mengklaim beberapa pasal dalam Konvensi Istanbul bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan sosial di negaranya, sehingga hal tersebut semakin memperkuat dorongan kelompok anti gender di Turki menuntut Presiden Erdogan dan AKP untuk keluar dari Konvensi Istanbul. Kelemahan utama dalam Konvensi Istanbul adalah konsep “gender” yang tertuang dinilai memiliki ambiguitas dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Konvensi Istanbul

mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial, bukan berdasarkan perbedaan biologis atau gender.

Konvensi Istanbul mengharuskan negara untuk memperkenalkan perspektif gender dalam beberapa pasal termasuk pendidikan (pasal 14), kewajiban umum tentang perlindungan dan dukungan (pasal 18), proses pidana (pasal 46), dan klaim suaka berbasis gender (pasal 60). Pasal tersebut beralih ke netralitas gender untuk tindakan terkait terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban, sehingga tidak adanya diskriminasi struktural. Namun jika konvensi tersebut melindungi kekerasan dalam rumah tangga dengan dimensi netral gender, ia akan gagal mencapai tujuannya terutama untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan.

4.2 Proses Ratifikasi Konvensi Istanbul Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan

AKP dibawah kepemimpinan Erdogan selalu berpihak kepada keputusan rakyat dan tidak pernah bentrok dengan militer Turki. Erdogan mengatakan *‘Aku akan mengikuti politik yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh Attaturk, seperti menjadikan masyarakat yang berbudaya dan modern dalam keislaman yang diyakini oleh mayoritas penduduk Turki.’* (Taghian, 2012). Menurut catatan biografinya, Erdogan adalah sosok dengan warna Islam yang kuat, namun ia tidak serta merta terlibat dalam perdebatan ideologis. Menjadi tokoh Islam tidak menghalanginya untuk tetap demokratis.

Erdogan meminta umat Islam untuk beralih dari debat ideologis ke pembuatan kebijakan. Keluarga Erdogan memiliki keinginan dan minat yang kuat terhadap pendidikan agama sejak kecil, terlihat dari tingginya kemauan orang tuanya bahwa Erdogan adalah seorang pemuda yang taat memilih pendidikan agama sesuai dengan keinginan orang tuanya, menggabungkan pendidikan agama klasik dengan pendidikan modern (Taghian, 2012).

Kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (Advalet ve Kalkinme Partisi-AKP) membawa wajah baru bagi pemerintah Turki yang merupakan partai politik pertama dengan akar Islamis yang berhasil menjadi aktor politik

utama di Turki (Çayır, 2008). Partai ini didasarkan pada kaum konservatif dan agenda utamanya adalah pembangunan dan perbaikan ekonomi serta menjaga demokrasi di Turki. AKP dikenal sebagai partai politik yang kebijakannya bermuara langsung pada kepentingan rakyat. Erdogan bersama parlemennya tidak ragu-ragu untuk bergandengan tangan dengan orang miskin untuk mengadili mereka menunjukkan kepada rakyat Turki bahwa pemerintah transparan dan tidak korup dengan mencerminkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka (Onis, 2012). Partai AK memperoleh popularitas instan dan menjadi gerakan politik terbesar yang didukung oleh rakyat Turki.

Selama dua periode menjabat sebagai Perdana Menteri Turki, Erdogan berfokus pada menerjemahkan cita-cita universal Islam ke dalam kebijakan publik yang adil dan efektif. Erdogan dan partai AKP lebih terbuka menjelaskan konsep sekularisme dan mengadopsi praktik sekularisme dalam demokrasi. Partai Keadilan dan Pembangunan Erdogan mengklaim bahwa Undang-undang dasar Turki yang melarang pemakaian hijab di ruang publik tersebut melanggar hak kebebasan beragama dan prinsip kesempatan yang sama bagi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan. Pada Oktober 2013, Erdogan yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mengumumkan paket reformasi yang disetujui oleh parlemen. Paket reformasi itu mencakup pencabutan undang-undang pelarangan hijab di berbagai lembaga pemerintah/negara, sekolah, dan perguruan tinggi negeri.

Untuk lebih menarik simpati masyarakat Turki, Partai AK secara masif berbicara tentang kesetaraan gender sebagai bagian dari platformnya. Pada tahun-tahun awal pemerintahan Erdogan menyambut baik kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk organisasi hak-hak perempuan dalam mengembangkan kebijakan kesetaraan gender. Pemerintah AKP ikut terlibat aktif dalam kebijakan tentang hak-hak perempuan dan organisasi perempuan; khususnya pada periode pertama, dilakukan upaya untuk mengadopsi kebijakan kesetaraan gender yaitu Konvensi Istanbul. Namun menurut (Deniz, 2016), penelitian menunjukkan bahwa pemerintah AKP mengizinkan

kampanye LSM dari kelompok feminis agar reformasi gender menampilkan citra yang baik dan menguntungkan secara internasional.

Turki menunjuk Dr. Feride Acar sebagai wakil untuk komite Ad Hoc CoE tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebuah organisasi yang dari April 2009 hingga Januari 2011 merancang Konvensi Istanbul (MÜFTÜLER, 2018). Kebijakan kesetaraan gender Turki yang memulai negosiasi akses menuju Uni Eropa dapat dilihat sebagai motivasi persiapan Turki untuk melebarkan sayapnya ke UE.

Pada Mei 2011, Turki menjadi tuan rumah dalam pertemuan Dewan Menteri CoE di Istanbul yang membuka penandatanganan Konvensi Istanbul. Konvensi ini mengakui kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individu dan diskriminasi terhadap perempuan. Turki aktif dalam proses persiapan dan penyusunan Konvensi Istanbul dan merupakan negara pertama yang menandatangani Konvensi tersebut. Pada saat itu, Turki menjadi Ketua Dewan Eropa sekaligus sebagai tuan rumah peluncuran Konvensi di Istanbul (Şeker & Sönmezocak, 2021, hal. 3). Karena tekanan posisi Turki sebagai ketua Dewan Eropa pada saat itu, mendorong Turki untuk menandatangani Konvensi Istanbul.

Kemudian Parlemen Turki dengan suara bulat meratifikasi Konvensi Istanbul pada 11 Mei 2011 dan diratifikasi pada 14 Maret 2012 dengan Keputusan Dewan Menteri No 2012/2816 (Yadav, 2021). Konservatisme yang mendapatkan momentum dengan pendekatan hukum dan politik pemerintah serta kebijakan sosial sangat mempengaruhi Konvensi Istanbul. Meskipun ketidaksetaraan gender dan kejahatan terhadap perempuan masih menjadi isu kritis dalam masyarakat Turki, kepentingan politik memainkan peran penting dalam kebijakan perempuan selama proses ini (Kütük-Kuriş, 2022). Ketika Konvensi Istanbul secara resmi dimasukkan ke dalam undang-undang domestik Turki No. 6284 pada 1 Agustus 2014, Kementerian Keluarga dan Kebijakan Sosial mengadakan pertemuan di Ankara untuk menentukan calon Turki untuk delegasi GREVIO.

Kemudian pada tahun 2013, AKP mulai membentuk masyarakat sipilnya sendiri, yaitu GONGO, untuk mengecilkan ruang sipil dan mencegah organisasi feminis independen berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan legislasi terkait isu-isu perempuan (Şeker & Sönmezocak, 2021). KADEM (Asosiasi Perempuan dan Demokrasi) didirikan pada 8 Maret 2013, pada Hari Perempuan Internasional, oleh putri Presiden Erdoğan, Sümeyye Erdoğan. KADEM secara khusus didirikan untuk menciptakan dan menyebarkan wacana konservatif AKP tentang gender. AKP mencoba mengkooptasi dan memanipulasi konsep seperti kesetaraan gender, mengklaim bahwa istilah “kesetaraan” membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlihat (Şeker & Sönmezocak, 2021, hal. 2). Menurut pandangan ini, tidak ada kesetaraan yang dapat ditimbulkan antara gender karena perempuan dan laki-laki tidak diciptakan setara. Recep Tayyip Erdoğan yang di setiap kesempatan pidatonya membicarakan pentingnya nilai keluarga. Partai AKP yang dinilai sebagai partai demokrasi konservatif telah mengubah Kementerian Perempuan dan Urusan Keluarga yang digantikan oleh Kementerian Keluarga dan Kebijakan Sosial (MÜFTÜLER, 2018, hal. 6).

4.3 Kebangkitan Gerakan Anti Gender di Turki

Wacana anti-gender berkembang hingga mendapatkan momentum dalam pemerintahan Turki di bawah Partai Keadilan dan Pembangunan, yang mengadopsi wacana populis serta melibatkan unsur nasionalisme dan konservatisme Islam (Political, 2023). Politik gender AKP menunjukkan bahwa kebijakan dan wacana politik partai mengikuti narasi pro-Islam yang menerapkan gagasan gender tradisional. Wacana anti-gender di Turki membicarakan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan tidak bisa setara karena bertentangan dengan kodrat dan jenis kelamin yang kemudian digunakan oleh pemerintah AKP untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memajukan tujuan politik (Corredor, 2019). Presiden Erdogan juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap gerakan feminis dan gagasan kesetaraan gender. Dalam pertemuan dengan organisasi perempuan, Erdogan

menyatakan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dan tidak ada persamaan antara laki-laki dan perempuan (Gülel, 2020).

Gerakan anti-gender Turki lebih berfokus pada perubahan wacana gender. Turki berusaha menciptakan wacana anti-gender yang dikenal sebagai keadilan gender (Eslen-Ziya, 2020). Untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah membentuk Kadınve Demokrasi Derneği (KADEM) atau Asosiasi Perempuan dan Demokrasi. KADEM adalah Asosiasi Perempuan dan Demokrasi yang dibentuk pada tahun 2013 oleh putri Presiden Erdogan, Sumeyye Erdogan Bayraktar untuk menjunjung tinggi nilai-nilai penting dari Asosiasi Perempuan dan Demokrasi perempuan Turki, dalam hal ini mempertahankan apa yang disebut sifat peran budaya, keluarga dan sosial (*Independent Türkçe*, 2019). KADEM aktif mendukung kebijakan yang melindungi keluarga sebagai pilar negara. KADEM juga memainkan peran penting dalam membentuk wacana agenda publik tentang isu-isu terkait kesetaraan. Selain itu, membicarakan gerakan anti gender di Turki juga tidak terlepas dari politik anti gender.

Desakan dari internal Turki sangat mempengaruhi keputusan pemerintah untuk mundur dari Konvensi Istanbul. Sebelum memperingati Hari Perempuan Sedunia pada Maret 2019, Dewan Keluarga Turki membuat ajakan di media sosial yang menyerukan masyarakat untuk menghadiri shalat Jumat di beberapa masjid di delapan kota besar bertepatan pada Hari Perempuan. Moto mereka adalah "*stop the global war on the family*" yang merupakan slogan dari mobilisasi yang diserukan oleh kelompok anti-gender di Eropa (Özkazanç, 2019). Mereka menuntut pembatalan Konvensi Istanbul dan pencabutan UU No. 6284, yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Seruan itu juga mengatakan bahwa slogan "Kesetaraan gender dan homoskesualitas adalah kejahatan terhadap kemanusiaan". Selain itu, mereka juga mengajukan tuntutan lain tentang topik kontroversial seperti hak asuh anak dan pembayaran perceraian dan distribusi aset dalam perceraian (Özkazanç, 2019).

Perdebatan menjadi semakin ramai ketika penulis media dari kanal Yeni Safak, Yusuf Kaplan mengkritik rencana KADEM dan Kementerian Pendidikan dan Keluarga untuk menerapkan kesetaraan gender di sekolah melalui akun Twitter pribadinya (Eslen-Ziya, 2020). Menurutnya, program tersebut telah merusak esensi keluarga dan harus dihapuskan. Pernyataan Yusuf Kaplan memicu diskusi hangat di media sosial Turki, dengan tagar utama #FamilyCollaps dan #IstanbulContractsNO (*Independent Türkçe*, 2019). Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Özlem Zengin, salah satu pendiri KADEM yang menyatakan bahwa program yang mereka jalankan adalah program yang mengutamakan perempuan dan keluarga. Penulis Yeni Safak Profesor Yildirim mendukung pernyataan Yusuf, mengatakan bahwa KADEM mendukung kesetaraan gender, yang tidak ada dalam konsep Islam yang maka dari itu dapat menghancurkan esensi keluarga (Doyle, 2017)

Diskusi berlanjut dengan semakin banyaknya pihak yang menyatakan penentangan mereka terhadap Konvensi Istanbul dan membuat banyak tuntutan untuk mundur dari Konvensi Istanbul. Ketua Yayasan Mehmet Bayraktutar, sebuah badan Solidaritas Keagamaan Turki Diyanet-Sen, juga mengatakan pada program Word Square dalam Televisi Turki Akit TV bahwa Konvensi Istanbul adalah proyek transformasi sosial yang melegitimasi amoralitas dan negara-negara modern yang menolak Konvensi Istanbul (Karasu, 2020). Selain itu, Persatuan Penulis Turki cabang Istanbul juga mengadakan konferensi pers yang menyerukan pembubaran Konvensi Istanbul.

Tuntutan masyarakat tersebut sekaligus sangat mempengaruhi praktik politik pemerintah Turki yang berkuasa. Upaya lobi yang terus dilakukan oleh internal terkait Konvensi Istanbul yang merusak nilai-nilai tradisional keluarga Turki akhirnya menjadikan Pejabat dari AKP mengisyaratkan akan mempertimbangkan penarikan Konvensi Istanbul pada tahun 2020. Pada akhirnya, tuntutan tersebut memengaruhi dan menggerakkan negara untuk melindungi nilai-nilai keluarga di Turki dan mengatasi ancaman yang dapat

merusak nilai-nilai tersebut dengan mendorong pemerintah Turki untuk memutuskan keluar dari Konvensi Istanbul.

4.4 Kebijakan Presiden Erdogan yang Menarik Turki Keluar Dari Konvensi Istanbul

Pernyataan Badan Komunikasi Turki telah secara resmi mengumumkan keputusan bahwa Konvensi Istanbul telah dibajak oleh sekelompok orang yang mencoba mendekriminalisasi homoseksualitas, yang melanggar nilai-nilai sosial dan budaya keluarga Turki. Berita resmi tersebut dirilis dalam Keputusan Presiden Nomor 3718 tanggal 20 Maret 2021 yang berbunyi:

“It is decided that the Council of Europe Treaty on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence signed on 11/5/2011 and ratified on 10/2/2012 with the Council of Ministers Decision No 2012/2816 is to be terminated based on Presidential Decree No 9 paragraph 3” (Erdogan, 2021)

Menyusul pernyataan dari Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay yang membagikan cuitan melalui twitter dengan mengatakan “We are determined to carry our sincere struggle to raise the dignity of Turkish women in society to the levels they deserve, by preserving our traditional social fabric” (Yadav, 2021). Walaupun Turki memutuskan untuk keluar dari Konvensi Istanbul, Turki akan terus memperjuangkan hak perempuan dengan undang-undang domestik yang tetap melihat pada budaya ataupun kultur masyarakat Turki.

Badan Komunikasi Turki juga mengeluarkan pernyataan tentang penarikannya dari Konvensi Istanbul sebagai berikut:

“The Istanbul Convention, originally intended to promote women’s rights, was hijacked by a group of people attempting to normalize homosexuality – which is incompatible with Türkiye’s social and family values. Hence the decision to withdraw. Türkiye is not the only country who has serious concerns about the Istanbul Convention. Six members of the European Union (Bulgaria, Hungary, Czechia, Latvia, Lithuania and Slovakia) did not ratify the Istanbul Convention. Poland has taken steps to withdraw from the Convention, citing an attempt by the LGBT community to impose their ideas about gender on the entire society.” (Directorat of Communication Turkey, 2021).

Menyusul keputusan tersebut, perempuan dan komunitas LGBTQ+ memulai demonstrasi massal di Turki untuk memprotes keputusan tersebut.

Pada 20 Maret 2021, Sekretaris Jenderal CoE menggambarkan penarikan Turki dari Konvensi Istanbul menunjukkan mundurnya partisipasi Turki terhadap perlindungan perempuan (Burić, 2021). Kemudian UN Women juga mendesak Turki untuk mempertimbangkan kembali penarikannya (UN Women, 2021). Dalam pernyataan tersebut, Presiden Majelis Parlemen CoE dan Ketua Komite Menteri mengumumkan bahwa mereka sangat menyesali keputusan Turki untuk menarik diri dari konvensi tersebut. Demikian pula, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan lebih dari empat puluh dan pakar hak asasi manusia regional meminta Turki untuk mempertimbangkan kembali keputusannya (BIA News Desk, 2021).

Upaya penarikan dari Konvensi Istanbul pada tahun 2021 terjadi di mana supremasi hukum diserang berat, pemisahan kekuasaan terkikis, dan negara diatur oleh keputusan presiden yang sewenang-wenang dan sepihak tanpa peninjauan parlemen dan konstitusional di bawah sistem presidensial baru. Perdebatan terhadap kesetaraan gender ini mencapai klimaks dengan upaya penarikan diri dari Konvensi melalui Keputusan Presiden pada 20 Maret 2021. Keputusan Presiden tersebut dikeluarkan tanpa berkonsultasi atau memberi tahu publik atau bahkan para Menteri, mengingat fakta bahwa Menteri Keluarga telah menyelenggarakan acara sampingan pada sesi ke-65 Komisi Status Perempuan dan menjadi tuan rumah Dewan Eropa (CoE) (Şeker & Sönmezocak, 2021, hal. 3). Hanya tiga hari sebelum keputusan Erdogan yang memberi tahu Sekretariat Jenderal CoE mengenai keputusan penarikan pada 22 Maret 2021, dan pemberitahuan tanggal penarikan Turki dari Konvensi Istanbul per 1 Juli 2021 (Council of Europe, 2021).

BAB 5

ALASAN PENARIKAN PRESIDEN ERDOGAN DARI KONVENSI ISTANBUL 2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dibalik keputusan Erdogan sebagai Presiden Turki keluar dari Konvensi Istanbul 2021 tentang perlindungan perempuan. Ironisnya, Turki adalah negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi sebuah Konvensi yang dikenal dengan Konvensi “Istanbul”, sebuah kota dimana perjanjian tersebut dibuka untuk penandatanganan pertama kalinya. Namun 10 tahun pasca bergabung dengan konvensi tersebut Turki merubah kebijakannya untuk menarik diri pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Erdogan.

5.1 Pengaruh Konservatisme Islam dalam Budaya Identitas Turki

Konvensi Istanbul menjadi ancaman terhadap konsep keluarga yang telah menjadi identitas budaya di Turki. Beberapa pasal dalam Konvensi Istanbul bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan sosial di Turki. Kelemahan dari Konvensi Istanbul adalah konsep “gender” yang tertuang dinilai memiliki ambiguitas dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Konvensi Istanbul mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial, bukan berdasarkan perbedaan biologis atau gender. Pada poin pasal nomor 4 dalam Konvensi Istanbul tertulis bahwa:

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status. (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2011)

Pasal 4 Konvensi Istanbul tersebut mewujudkan kewajiban untuk melindungi hak-hak korban, dan tidak ada diskriminasi atas dasar apa pun seperti jenis kelamin, gender, atau ras. Warna kulit, bahasa, agama, opini politik, asal kebangsaan atau sosial, afiliasi dengan etnis minoritas, properti, kelahiran, orientasi seksual, identitas gender, usia, kesehatan, disabilitas,

status perkawinan, status migran atau pengungsi, atau status lain diperbolehkan.

Istilah orientasi seksual dan identitas gender dalam pasal di atas dianggap merusak struktur keluarga, mendorong kekerasan serta kaum konservatif juga memusuhi prinsip kesetaraan gender. Beberapa kelompok agama dan fundamentalis berpendapat bahwa konvensi istanbul yang memuat tentang kesetaraan gender dinilai tidak senilai dengan paham keagamaan dari Turki. Pada awalnya, Konvensi Istanbul dimaksudkan untuk mempromosikan hak-hak perempuan, namun dibajak oleh sekelompok orang yang mencoba untuk menormalisasikan homoseksualitas yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya Turki.

Pasal-pasal tentang kesetaraan gender dianggap sebagai bentuk legalisasi homoseksualitas. Kata gender menggantikan kata "jenis kelamin", yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukanlah hasil dari perbedaan biologis, tetapi perbedaan yang dibangun secara sosial di antara kedua jenis kelamin. Konsep kesetaraan gender di Turki menjadi wacana anti-gender yang berkembang sehingga mendapatkan momentum pada masa pemerintahan dibawah kepemimpinan Partai AK bersama Erdogan yang mengadopsi wacana populis serta melibatkan unsur-unsur Islamis konservatisme dan nasionalisme.

Pasal 4 dalam Konvensi Istanbul memperkuat tren instrumen hak asasi manusia saat ini dengan memasukkan ranah publik dan privat ke dalam kewenangannya dan memberikan contoh pendekatan sensitivitas gender: yaitu Negara-negara harus mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan-kebijakan negara bagian yang efektif, komprehensif dan terkoordinasi, termasuk semua langkah-langkah yang relevan untuk mencegah dan memerangi segala bentuk kekerasan dalam ruang lingkup Konvensi ini.

Selanjutnya dalam pasal 12-16 yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mempromosikan perubahan pola perilaku sosial dan budaya perempuan dan laki-laki. Pernyataan ini meletakkan dasar bagi budaya serta struktur

keluarga tradisional dan peran yang didefinisikan di dalamnya untuk jenis kelamin yang berbeda. Dari beberapa pasal Konvensi Istanbul yang menjadi dua argumen yang menjadi serangan terhadap Konvensi Istanbul, yaitu kebijakan gender dan konsepsi gender. Pasal 14 dalam Konvensi Istanbul menyebutkan bahwa:

Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, adapted to the evolving capacity of learners, in formal curricula and at all levels of education (Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, 2011)

Pasal 14 dalam Konvensi Istanbul yang menyerukan kepada pemerintah untuk mendidik rakyat mereka tentang “kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, peran gender non-stereotip, saling menghormati, penyelesaian konflik tanpa kekerasan dalam hubungan antarpribadi, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan hak atas integritas pribadi... dalam kurikulum formal dan di semua tingkat pendidikan.”. Hal ini sama dengan pengenalan tentang 'peran gender non-stereotipikal' ke dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan. Dapat diartikan bahwa sekolah akan dipaksa untuk mencoba meyakinkan anak-anak bahwa mereka dapat memilih 'identitas gender' mereka – sepenuhnya tanpa persetujuan orang tua mereka. Dengan demikian, Konvensi tersebut melemahkan hak dasar orang tua untuk membesarkan anak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Erdogan juga pernah membuat pernyataan dalam pidato KTT yang mengatakan kepada audiens bahwa perempuan dan laki-laki tidak dapat diperlakukan sama karena bertentangan dengan hukum islam, agama telah menempatkan posisi bagi perempuan yaitu bersifat keibuan dimana peran mereka adalah merawat anak-anak dan anggota keluarganya. Tidak hanya itu, Pejabat AKP terutama Presiden Erdogan, dalam banyak kesempatan mengklaim bahwa gerakan feminis tidak mewakili pandangan mayoritas perempuan Turki, melainkan mewakili pandangan minoritas kecil elit

perempuan dengan gaya hidup Barat yang tidak mewujudkan semangat wanita Turki yang otentik (Negrón-Gonzales, 2016, hal. 13).

Dalam iklim gender seperti itu, penyebaran stereotip gender yang dilegitimasi secara agama mempolarisasi persepsi sosial tentang hubungan gender dan secara ketat membagi kehidupan sosial menjadi ruang feminin dan maskulin. Ketimpangan dan diskriminasi gender di ruang privat dan publik, apalagi dinaturalisasi. Adanya perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat disangkal. Inisiatif untuk mempromosikan pekerjaan perempuan dan memerangi kekerasan dalam rumah tangga tampaknya tidak mendorong kesetaraan gender. Hal tersebut seringkali berpengaruh dalam mengubah norma gender yang mendasari masyarakat: jika masyarakat sangat patriarkal, maka iklim gender konservatif-religius dapat mengarah pada perluasan kekuasaan laki-laki atas kepentingan dan tubuh perempuan. Erdogan bersama Partai AKP-nya ingin mengembalikan nilai-nilai keluarga tradisional dan menjadikan peran keluarga tradisional sebagai bangunan nasional.

Pada akhirnya, Konvensi Istanbul dapat melemahkan keluarga, menganggap perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai sumber utama kekerasan. Selain itu, Konvensi Istanbul memaksakan ideologi gender dengan menghapus gagasan biologis objektif tentang jenis kelamin dan menggantinya dengan konsep gender, yang dipahami sebagai konstruksi sosio-kultural, yang secara efektif menjadikan penggunaan konsep ideologis ini wajib di semua tingkat kebijakan negara.

5.2 Desakan Kepentingan Politik Dari Internal Partai Yang Mendominasi

Alasan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul dipandang sebagai salah satu strategi politik Erdogan untuk mempertahankan mayoritas kekuasaan guna mendapatkan dukungan fundamentalis agama dalam pemilihan presiden Turki mendatang. Oleh karena itu, dalam pertimbangan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2023, Partai menggunakan kontroversi tentang Konvensi sebagai tawar menawar untuk mendapatkan dukungan dari ultra-konservatif

pemilih. Partai Felicity sayap kanan dan LSM konservatif (seperti Turkiye Aile Meclisi, Turkiye Dusunce Platformu, dan Diyanet-Sen) melobi pemerintah tentang bahaya Konvensi Istanbul terhadap keutuhan keluarga Turki (Jolly & Deger, 2021).

Pada Januari 2021 Erdogan mengajukan proposal ke Partai Kebahagiaan Islam (SP), yang bersekutu dengan partai sekuler, nasionalis, dan konservatif. Partai Sosialis, yang memenangkan 2,5 persen suara dalam pemilihan parlemen 2018, memiliki akar Islam yang sama dengan Partai Keadilan dan Pembangunan dan populer di kalangan pemilih ultra-konservatif. Erdogan menggunakan pengunduran dirinya dari Pakta Istanbul sebagai alat tawar-menawar untuk koalisi pemilu (Quispe, 2023, hal. 31). Penarikan diri dari Konvensi Istanbul ditafsirkan sebagai upaya politik untuk mengamankan basis dukungan AKP. Erdogan dan calon wali kota dari partainya AKP kalah dalam pemilihan walikota Istanbul pada bulan Juni 2019 (CNN Indonesia, 2019). Penandatanganan Konvensi Istanbul merupakan langkah pragmatis untuk melindungi citra liberal dari Partai AKP. Oleh karena itu, hak-hak perempuan mudah diinstrumentasi untuk tujuan politik dari kekuatan politik.

Mayoritas dari Partai AKP terdiri dari lebih banyak politisi religius/konservatif, dan beberapa penulis islamis di kalangan pemerintah memulai serangan diskursif terhadap kesetaraan gender dengan istilah “ideologi gender”. Sejak saat itu, oposisi terhadap Konvensi Istanbul dan perspektif gendernya mulai menjadi salah satu narasi terpenting dari gerakan anti-gender di Turki.

Munculnya gerakan anti-gender yang populer di Turki terkait erat hubungannya dengan politisi Konvensi Istanbul. Kritik konservatif Konvensi Istanbul berkisar pada dua penggunaan ketentuan dalam Konvensi dundang-undang No. 6824 yang diadopsi oleh Turki. Pertama, Konvensi Istanbul dikecam merangkul konsep gender dan memaksakannya ke dalam hukum nasional Turki yang lambat laun dapat menghancurkan konsep kekeluargaan Turki serta mempromosikan homoseksualitas. Selanjutnya, pada Mei 2020, terbitnya laporan yang menuntut penarikan dari Konvensi oleh platform

konservatif yang disebut Türkiye Düşünce Kuruluşu (Platform Pemikiran Turki) semakin mengintensifkan perdebatan di dalam Partai AKP yang berkuasa (Doyle, 2017).

Politik gender AKP memang menunjukkan bahwa kebijakan dan wacana politik partai mengikuti narasi pro-islam yang menerapkan konsep gender tradisional. Selain itu, ada banyak contoh retorika anti-gender dari anggota Partai AK. Presiden Erdogan telah menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa “Pria dan perempuan tidak bisa setara. Itu bertentangan dengan kodrat mereka. Dalam pidato yang disiarkan di TV, Uğur İyылak dari Partai AK mengklaim bahwa “kodrat perempuan adalah menjadi budak.” Mehmet Muezzinoglu, anggota Partai AK dan mantan menteri kesehatan, menyatakan bahwa menjadi ibu adalah satu-satunya karier untuk perempuan. Mantan ketua Komisi Hak Asasi Manusia Majelis Agung Nasional Turki Üstün mengklaim: “Orang yang diperkosa tidak boleh melakukan aborsi. Pemerkosa lebih polos daripada korban yang melakukan aborsi. Mantan walikota Ankara berbagi pandangan ini: dia menegaskan “perempuan yang menjadi korban pemerkosaan harus mati sebelum melakukan aborsi”.

Motivasi elektoral dan ideologis memainkan peran penting dalam keputusan penarikan Erdogan dari Konvensi Istanbul. Konvensi Istanbul tampaknya merupakan upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan basis politik yang menyusut. Dengan kata lain, langkah penarikan dari Konvensi Istanbul bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari sayap Kanan Turki dan memecah blok oposisi dengan menarik pemilih partai politik minoritas yang dibutuhkan AKP untuk memenangkan pemilihan presiden mendatang.

Proses perubahan kebijakan dan regulasi terhadap kelompok-kelompok politik di Turki dapat mempengaruhi keputusan suatu negara atau individu dalam menentukan kebijakan luar negeri. Salah satu saluran terpenting yang digunakan para pemimpin AKP untuk membuat dan menyebarluaskan wacana tentang gender yang sejalan dengan pandangan dunia religius dan konservatif mereka adalah masyarakat sipil atau organisasi. Dua organisasi yang paling menonjol adalah Asosiasi Perempuan dan Demokrasi (*Kadın ve Demokrasi*

Derneji, KADEM) dan Yayasan Layanan Pemuda dan Pendidikan (*Türkiye Gençlik ve Eğiitime Hizmet Vakfı*, TÜRGEV).¹ Organisasi masyarakat sipil ini lebih condong sebagai Organisasi Non-Pemerintah yang Diselenggarakan Pemerintah (GONGO). Penyebutan nama mereka memang organisasi “masyarakat sipil”; namun, mereka tidak independen dan tidak berkontribusi pada perluasan ruang sipil dan demokratisasi. Sebaliknya, mereka bekerja untuk mendorong agenda negara dan menyebarluaskan pandangan dan ideologinya. Mereka didirikan oleh perempuan dari dalam aparaturnegara atau dikontrol secara ketat oleh negara (Doyle, 2017).

Partai AKP yang selama ini menggunakan prinsip Islam demi keadilan yang lebih demokratis, nyatanya mengesampingkan hak-hak perempuan, karena AKP menuntut perempuan untuk menjadi lebih lembut dan lebih tradisional (Negrón-Gonzales, 2016). Sifat patriarki dari pandangan gender tradisional AKP dianggap akan berdampak negatif terhadap kesetaraan gender di Turki. Upaya AKP membangun wacana gender yang menolak feminisme dan kesetaraan gender untuk melestarikan nilai-nilai inti perempuan Turki dan praktik mereka. Pengaturan kelembagaan dan politik dalam proses pembuatan kebijakan berimplikasi pada kebijakan penarikan Turki dari Konvensi Istanbul.

Pada bulan Agustus 2020, anggota-anggota dari AKP memberi isyarat untuk mempertimbangkan keputusannya menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul setelah kaum konservatif agama dan berbagai ordo Muslim memulai upaya lobi yang intens terhadap Konvensi tersebut, mengecamnya karena merusak “nilai-nilai keluarga tradisional Turki. Meskipun dorongan untuk menjadi anggota UE dan gerakan hak-hak perempuan memberikan kondisi yang bermanfaat, AKP tidak menggunakan kekuatan transformatifnya untuk mendorong konstituen konservatifnya menuju kesetaraan gender. Sebaliknya,

¹ TURGEV didirikan pada tahun 1996 dibawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, Walikota Istanbul pada saat itu. Yayasan ini menjadi asrama bagi perempuan muda, baik di pendidikan menengah maupun tinggi. Hal ini menyatakan bahwa selain menyediakan tempat yang aman bagi siswa perempuan muda, misinya adalah untuk berkontribusi pada perkembangan moral, spiritual, etika, intelektual dan ilmiah mereka. Yayasan tersebut menyelenggarakan lokakarya dan seminar tentang pendidikan. Hingga tahun 2012, TURGEV hanya memiliki yayasan di Istanbul, setelah itu mulai beroperasi di kota lain. Bersama Ensar Foundation, TURGEV mendirikan yayasan serupa, bernama TURKEN, untuk mendukung mahasiswa dan akademisi Turki di luar negeri di Amerika Utara dan Inggris. Selain menyediakan tempat tinggal siswa, tujuan yayasan ini adalah untuk memberikan peluang dan pengalaman budaya, sosial dan pendidikan bagi siswa Muslim. Pada 2015, berkat pengalamannya di bidang pendidikan, TURGEV mendirikan Universitas Ibn-i Haldun, yang menerima mahasiswa untuk pertama kalinya pada 2017. Esra Albayrak, putri Presiden Erdoğan menjabat sebagai dewan direksi TURGEV dan TURKEN. Bilal Erdoğan, putra Presiden juga pernah menjabat sebagai dewan direksi TURGEV hingga 2017.

AKP telah memperkuat stereotip gender tradisional dengan mempromosikan keluarga dan keibuan dengan cara yang dilegitimasi oleh agama, adat dan tradisi.



BAB 6

KESIMPULAN

Turki menjadi negara tuan rumah dan menjabat sebagai ketua Komite Menteri Dewan dalam pelaksanaan Konvensi Istanbul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2011. Kemudian, Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Parlemen Turki pada 14 Maret 2012 dan secara resmi dimasukkan ke dalam undang-undang domestik Turki No. 6284. Paradoksnya, seputuh tahun kemudian Turki menjadi negara pertama yang memutuskan untuk menarik diri dari Konvensi tersebut dengan deklarasi Keputusan Presiden pada 20 Maret 2021.

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan penulis, kebijakan Presiden Erdogan menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul dipengaruhi dari segi domestik. Adanya politik yang mendominasi serta budaya yang mengakar pada masyarakat Turki membawa pengaruh terhadap keputusan Erdogan. Faktor pengaruh konservatisme yang menyelimuti Erdogan melibatkan unsur-unsur islamis nasionalisme dan konservatisme. Erdogan bersama dengan Partai Kesejahteraan Sosial-nya ingin mengembalikan nilai-nilai keluarga tradisional dan menjadikan peran keluarga tradisional sebagai bangunan nasional di Turki

Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Valerie M. Hudson, peran kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat sebagai hasil dari aktor-aktor politik domestik. Tuntutan internal dari masyarakat Turki sendiri dilakukan sembari mempengaruhi praktik politik pemerintah Erdogan. Upaya lobi yang terus dilakukan terkait Konvensi Istanbul yang merusak nilai-nilai tradisional keluarga Turki mempengaruhi pemerintah Turki untuk mempertimbangkan penarikan. Disamping itu, Erdogan ingin mengembalikan basis pemilih konservatifnya dan untuk mengembalikan popularitas yang sempat tenggelam. Dengan adanya tekanan politik tersebut, Erdogan sebagai aktor negara memutuskan untuk menarik Turki keluar dari Konvensi Istanbul pada tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayşe Ozek Karasu. (2020). *İstanbul Sözleşmesi'ne kim neden karşı çıkıyor*. <https://m.haberturk.com/yazarlar/ayse-ozek-karasu/2754167-istanbul-sozlesmesine-kimneden-karsi-cikiyor>
- BIA News Desk. (2021). *CoE member states call on Turkey to return to Istanbul Convention*. <https://bianet.org/english/women/241737-coe-member-states-call-on-turkey-to-return-to-istanbul-convention>
- Burić, M. P. (2021). *Secretary General responds to Turkey's announced withdrawal from the Istanbul Convention - Portal*. Council of Europe Secretary General. <https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-responds-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention>
- Çayır, K. (2008). *The emergence of Turkey's contemporary 'Muslim democrats'. Secular and Islamic politics in Turkey: The making of the justice and development party*.
- CNN Indonesia. (2014). *Mantan PM Turki Dilantik Menjadi Presiden*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140829113001-134-2035/mantan-pm-turki-dilantik-menjadi-presiden>
- Concil, of E. (2011). *Convention on Preventing and Combating Violence against Women (Istanbul Convention)*. *Council of Europe Treaty Series*, 210.
- Convention, I. (2014). *A tool to end female genital mutilation*.
- Corredor, E. S. (2019). Unpacking “Gender Ideology” and the Global Right’s Antigender Countermovement. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 44(3), 613–638. <https://doi.org/10.1086/701171>
- Council of Europe. (2011). *Istanbul Convention infographic leaflet*. <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home>
- Council of Europe. (2021). *Turkey*. <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/turkey>
- Creswell, J. (2003). *creswell_Research Methods_Qual_Quant Mixed Methods Approaches.pdf* (p. 137).
- Cumhuriyet. (2019). *İçişleri Bakanı Soylu, kadına yönelik artan şiddeti kabullendi*. <https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/icisleri-bakani-soylu-kadina-yonelik-artan-siddeti-kabullendi-1702396>
- Deniz, K. (2016). Locating the politics of gender: PAtriarchy, neol-liberal governance and violence in Turkey. *Research and Policy on Turkey*, 1:2, 103–118.
- Doyle, J. L. (2017). State control of civil society organizations: the case of Turkey. *Democratization*, 24(2), 244–264.

<https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1159555>

Erdogan, R. T. (2021). *Resmî Gazete*. 31429.

Eslen-Ziya, H. (2020). Right-wing populism in New Turkey: Leading to all new grounds for troll science in gender theory. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 76(3), 1–9. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i3.6005>

Europe, C. of. (2011). *Key facts about the Istanbul Convention*, <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/key-facts>

Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, Pub. L. No. 210, Council of Europe Treaty Series - No. 210 1 (2011). <https://doi.org/10.18485/genero.2022.26.1.1>

Fatih Beyaz. (2021, March 20). *Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığına dair karar Resmî Gazete'de yayımlandı*. <https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-istanbul-sozlesmesinden-ayrildigina-dair-karar-resmi-gazetede-yayimlandi/2182148>

FRA. (2014). *Violence against Women: an EU-wide survey*. http://fra.europa.eu/sites/def%0Aault/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

Gülel, D. (2020). Patterns of Misogyny in Turkey's Contemporary Political Discourse: An Analysis of the Presidential Speeches. *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Societa*, 2(1), 35–57. <https://doi.org/10.13130/2612-6672/13436>

Hudson, V. (2005). *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations*. *International Studies Association*. Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA, and 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ,.

İlkesİ, D. T. (n.d.). *İstanbul sözleşmesi'nin dört temel ilkesi*.

Jolly, S., & Deger, A. (2021). *Conservative Backlash in Europe and Why Turkey Left the Istanbul Convention on Violence Against Women* Ayşenur Deger, Department of Political Science, Syracuse University, Syracuse, NY, USA Seth Jolly, Department of Political Science, Syracuse University, . 1–35.

Jones, D. (2021). Case Against Turkish Women's Rights Group Provokes Outrage. *Voice of America*. <https://www.voanews.com/a/case-against-turkish-women-s-rights-group-provokes-outrage/6539521.html>

Key facts about the Istanbul Convention - Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence. (2011). <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/key-facts>

Kütük-Kuriş, M. (2022). The rise and fall of support for the Istanbul Convention: Understanding the case of KADEM. *Women's Studies International Forum*, 93, 102601. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102601>

- M. Mas'ood. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. LP3ES.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- MÜFTÜLER, M. (2018). Gender Equality in Turkey. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 3–14.
- Negrón-Gonzales, M. (2016). The feminist movement during the AKP era in Turkey: challenges and opportunities. *Middle Eastern Studies*, 52(2), 198–214. <https://doi.org/10.1080/00263206.2015.1125339>
- Olga, J. (2015). The Istanbul Convention: a new chapter in preventing and combating violence against women. *Australian Law Journal*, 89. http://oro.open.ac.uk/46126/3/Jurasz-Istanbul_Convention_ORO.pdf
- Onis, Z. (2012). Turkey and Arab Spring: Between Ethics and Self-Interest. *Insight Turkey*, 14, 45–63.
- Özkazanç, A. (2019). *The new episode of anti-gender politics in Turkey | Engenderings*. <https://blogs.lse.ac.uk/gender/2019/05/20/new-episode-anti-gender-turkey/>
- Partai Milik Erdogan Kalah, Istanbul Resmi Gelar Pemilu Ulang*. (2019). <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190507000854-120-392493/partai-milik-erdogan-kalah-istanbul-resmi-gelar-pemilu-ulang>
- Political, G. (2023). *RIGHT-WING POPULISM AND ANTI-GENDER MOVEMENTS : 2020*.
- Quispe, J. (2023). CRITICAL ANALYSIS OF THE AKP'S GENDER POLITICS: TOWARDS WITHDRAWAL FROM ISTANBUL CONVENTION. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย*, 4(1), 88–100.
- Resdifianti, F., Septianti, D., & Ratih, K. (2022). *TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP KELUARNYA TURKI*. 6(2), 133–154. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.302>
- Sayin Ayşe. (2021). *Meclis'in kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilmesi hukuka uygun mu? - BBC News Türkçe*. <https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56467755>
- Şeker, B., & Sönmezocak, E. B. (2021). *Withdrawal from the Istanbul Convention : War on Gender Equality in Turkey*. 2.
- Simonovic, D. (2014). Global and Regional Standards on Violence Against Women: The Evolution and Synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions. *Human Rights Quarterly*, 36, 590–606.

Sosyal medyadaki KADEM tartışması büyüyor: Aile yapısına ters mi, değil mi? | Independent Türkçe. (2019).

<https://www.indyturk.com/node/49646/haber/sosyal-mediyadakikademtartismasi-buyuyor-aileyapısına-tersmi-değil-mi>

Statement by UN Women on Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention | News and events: Statements | UN Women – Headquarters. (2021).

<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/3/statement-un-women-turkey-withdrawal-from-the-istanbul-convention>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Taghian, S. (2012). *Erdogan – Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*. Pustaka Al-Kautsar.

We Will Stop Femicide. (n.d.). *KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU*. <http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/>

Yadav, M. (2021). *Türkiye* - Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence*. <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/turkey>